

BAB II

MANAJEMEN PENDIDIKAN

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Menurut Nanang Fattah (2000: 1) bahwa manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick sebagaimana dikutip oleh Nanang Fattah (2000: 1) karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet sebagaimana dikutip oleh Nanang Fattah (2000: 1) karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Selanjutnya Fattah mengatakan, dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik.

Sementara itu, H.A.R. Tilaar (2002: 10-11) mengemukakan bahwa manajemen pada hakikatnya berkenaan dengan cara-cara pengelolaan suatu lembaga agar supaya lembaga tersebut efisien dan efektif. Suatu lembaga akan efisien apabila investasi yang ditanamkan di dalam lembaga tersebut sesuai atau memberikan profit sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, suatu institusi akan efektif apabila pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip yang tepat dan benar sehingga berbagai

kegiatan di dalam lembaga tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan.

Meskipun cenderung mengarah pada satu fokus tertentu, para ahli masih berbeda pandangan dalam mendefinisikan manajemen dan karenanya belum dapat konsensus bahwa manajemen menyangkut derajat keterampilan tertentu. Untuk memahami istilah manajemen, pendekatan yang dipergunakan di sini adalah berdasarkan pengalaman manajer. Meskipun pendekatan ini mempunyai keterbatasan, namun hingga kini belum ada perbaikan. Manajemen di sini dilihat sebagai suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Manajemen merupakan suatu proses sedangkan manajer dikaitkan dengan aspek organisasi (orang-struktur-tugas-teknologi) dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan yang lain, serta bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan sistem (Nanang Fattah, 2000: 1).

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pemimpinan (*Leading*), dan Pengawasan (*Controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

2. Tujuan Manajemen

Menurut Shrode Dan Voich sebagaimana dikutip oleh Nanang Fattah (2000: 15) tujuan utama manajemen adalah *produktivitas* dan *kepuasan*. Mungkin saja tujuan ini tidak tunggal bahkan jamak atau rangkap, seperti peningkatan mutu pendidikan/lulusannya, keuntungan/profit yang tinggi, pemenuhan kesempatan kerja, pembangunan daerah/nasional, tanggung jawab sosial. Tujuan-tujuan ini ditentukan berdasarkan penataan dan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan, peluang, dan ancaman.

Apabila produktivitas merupakan tujuan maka perlu dipahami makna produktivitas itu sendiri. Sutermeister sebagaimana dikutip oleh Nanang Fattah (2000: 15) membataskan produktivitas sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kinerja dengan mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya. Produktivitas itu sendiri dipengaruhi perkembangan bahan, teknologi, dan kinerja manusia. Pengertian konsep produktivitas berkembang dari pengertian teknis sampai dengan perilaku. Produktivitas dalam arti teknis mengacu kepada derajat keefektifan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan dalam pengertian perilaku, produktivitas merupakan sikap mental yang senantiasa berusaha untuk terus berkembang.

Berdasarkan pengertian teknis produktivitas dapat diukur dengan dua standar utama, yaitu produktivitas fisik dan produktivitas nilai. Secara

fisik, produktivitas diukur secara kuantitatif seperti banyaknya keluaran (panjang, berat, lamanya waktu, jumlah). Sedangkan berdasarkan nilai, produktivitas diukur atas dasar nilai-nilai kemampuan sikap, perilaku, disiplin, motivasi, dan komitmen terhadap pekerjaan/tugas. Oleh karena itu mengukur tingkat produktivitas tidaklah mudah, di samping banyaknya variable, juga ukuran yang digunakan sangat bervariasi.

Dalam perspektif manajemen, kebijakan pemerintah Kota Pekalongan menetapkan sekolah model Pendidikan Agama Islam (PAI) tentunya merupakan upaya manajerial di bidang pendidikan, lebih khusus lagi bidang pendidikan agama. Diketahui oleh banyak pihak bahwa Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah secara umum selama ini lebih pada aspek kognitif saja. Sekolah-sekolah yang ada dirasakan oleh beberapa kalangan tidak produktif menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Persoalan itu dipertegas lagi dengan merosotnya akhlaq generasi sekarang. Dalam konteks inilah, diharapkan kebijakan pemerintah Kota Pekalongan menetapkan sekolah model PAI berdampak pada perubahan positif pembelajaran PAI di sekolah-sekolah dan bisa berdampak pula pada upaya manajerial pemerintah Kota Pekalongan mewujudkan masyarakat yang religius.

3. Teori Manajemen

Menurut Nanang Fattah (2000: 22-29) bahwa Teori Manajemen ada tiga, antara lain yaitu:

a. Teori Klasik

Teori klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia itu sifatnya rasional, berfikir logik, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Oleh karena itu teori klasik berangkat dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktur/anatomi organisasi.

Salah satu teori klasik adalah Manajemen Ilmiah (*Scientific Management*) dipelopori oleh Frederik W. Taylor (1856-1915). Pendekatan ilmiah ini berpandangan bahwa yang menjadi sasaran manajemen adalah mendapatkan kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawannya.

Prinsip Studi Waktu, dinyatakan bahwa semua usaha yang produktif harus diukur dengan studi waktu secara teliti (*Time and Motion Study*). Ukuran standar harus diberikan untuk semua pekerjaan. Studi waktu ini dipelopori oleh Gilbreth (1911). Selain itu, prinsip Hasil-Upah, yaitu upah yang diberikan harus sesuai dengan hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan studi waktu.

Pelopor klasik lainnya yaitu Henri Fayol (1916) menerbitkan *Administration Industrielle et Generale* yang berisi lima pedoman manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkoordinasian dan pengawasan. Selanjutnya Gulick dan Urwick (1930) populer dengan akronim POSDCORB (*Planning, Organizing,*

Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) sebagai kegiatan manajerial dan merupakan proses manajemen.

Aliran klasik lainnya dipelopori oleh Max Weber (1947), teori ini timbul sejak Perang Dunia I, waktu itu sering terjadi pertentangan pada kalangan buruh. Menurut Weber birokrasi merupakan ciri dari pola organisasi yang strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga secara maksimal dapat memanfaatkan tenaga ahli. Organisasi harus diatur secara rasional, impersonal dan bebas dari sikap prasangka.

b. Teori Neo-Klasik

Teori ini timbul sebagian karena pada para manajer terdapat berbagai kelemahan dengan pendekatan klasik. Pada kenyataannya manajer ada kesulitan dan menjadi frustrasi karena orang tidak selalu mengikuti pola tingkah laku yang rasional. Di sini perlu upaya untuk membantu para manajer dalam menghadapi manusia, agar organisasi lebih efektif. Beberapa ahli berusaha memperkuat teori klasik dengan wawasan sosiologi dan psikologi. Dengan adanya peralihan yang lebih berorientasi pada manusia dikenal dengan pendekatan perilaku sebagai ciri utama teori Neo-Klasik.

Teori ini berasumsi bahwa manusia itu makhluk sosial dengan mengaktualisasikan dirinya. Beberapa pelopor aliran neo-klasik ini antara lain: Elton Mayo dengan Studi Hubungan antar-Manusia, atau tingkah laku manusia dalam situasi kerja terkenal dengan Studi

Hawthorne. Berdasarkan hasil studi ini ternyata kelompok kerja informal lingkungan sosial pekerja mempunyai pengaruh yang besar terhadap produktivitas.

Pengikut aliran ini Chester I. Barnard (1976) yang menyatakan bahwa hakikat organisasi adalah kerjasama, yaitu kesediaan orang saling berkomunikasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Individu harus bekerja sesuai dengan kehendak organisasi. Keseimbangan harus dijaga antara imbalan yang diberikan kepada individu dan sumbangan individu terhadap tercapainya tujuan organisasi. Dengan begitu Barnard berpendapat bahwa: Suatu manajemen dapat bekerja secara efisien dan tetap hidup jika tujuan organisasi dan kebutuhan perorangan yang bekerja pada organisasi itu dijaga seimbang.

Pelopor lainnya adalah Douglas McGregor, ia menyatakan bahwa manajemen akan mendapatkan manfaat besar bila ia menaruh perhatian pada kebutuhan sosial dan aktualisasi diri karyawan. Gregor mengemukakan dua teori, yaitu Teori X yang berasumsi bahwa manusia itu/karyawan tidak menyukai kerja, tidak ada ambisi, tidak bertanggung jawab, menolak perubahan dan lebih baik dipimpin daripada memimpin. Sedangkan teori Y mengandung isi bahwa manajer memandang bawahan bersedia bekerja, bertanggung jawab, mampu mengendalikan diri, dan berpandangan luas serta kreatif.

c. Teori Modern

Pendekatan modern berdasarkan hal-hal yang sifatnya situasional. Artinya orang menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi dan mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Asumsi yang dipakai ialah bahwa orang itu berlainan dan berubah baik kebutuhannya, reaksinya, tindakannya yang semuanya bergantung pada lingkungan. Selanjutnya orang itu bekerja di dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Murdick dan Ross, sistem organisasi itu terdiri dari individu, organisasi formal, organisasi informal, gaya kepemimpinan, dan perangkat fisik yang satu sama lain saling berhubungan.

Pendekatan sistem terhadap manajemen berusaha untuk memandang organisasi sebagai sebuah sistem yang menyatu dengan maksud tertentu yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan. Pendekatan sistem tidak secara terpisah berhubungan dengan berbagai bagian dari sebuah organisasi melainkan memberikan kepada manajer suatu cara untuk memandang organisasi sebagai keseluruhan dan sebagai bagian dari yang lebih besar (lingkungan).

William A. Shrode dan D. Voich mendefinisikan sistem sebagai berikut: *A system is a set of interrelated parts, working independtly and jointly, in pursuit of common objectives of the whole within a kompleks anvironnment.* Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Fitz Gerald dan Stalling, sistem yang diartikan

sebagai berikut: *A system can be defined as a network of interrelated procedures that are in joint together to perform an activity or to accomplish a specific objectives. It is, in effect, all ingredients which make up the whole.*

Dari pengertian tentang sistem, dapat diidentifikasi bahwa sistem mempunyai makna: 1) terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya, 2) bagian-bagian yang saling berhubungan itu dapat berfungsi baik secara independen maupun secara bersama-sama, 3) fungsinya bagian-bagian tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan umum secara keseluruhan, 4) suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian itu berada dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Berdasarkan pengertian di atas secara eksplisit dikemukakan bahwa suatu sistem itu lebih cenderung bersifat terbuka.

4. Prinsip-Prinsip Manajemen

Menurut Nanang Fattah (2000: 33-45) ada tiga Prinsip Manajemen, antara lain yaitu:

a. Prinsip Manajemen Berdasarkan Sasaran (MBS)

Istilah MBS pertama kali dipopulerkan sebagai suatu pendekatan terhadap perencanaan oleh Peter Drucker (1954). Sejak itu, MBO (*Management By Objectivity*) telah memacu banyak pengkajian, evaluasi, dan riset. MBO merupakan teknik manajemen yang membantu memperjelas dan menjabarkan tahapan tujuan

organisasi. Dengan MBO dilakukan proses penentuan tujuan bersama antara atasan dan bawahan. Manajer tingkat atas bersama-sama dengan manajer tingkat bawah bersama-sama menentukan tujuan unit kerja agar serasi dengan tujuan organisasi.

Tujuan organisasi adalah segala sesuatu yang harus dicapai organisasi dalam melaksanakan misinya. Menurut John R. Schermerhorn bahwa organisasi pada dasarnya mempunyai tujuan resmi yang disebut misi, dan tujuan operasi. Misi organisasi membantu organisasi dalam identifikasi, integrasi, kolaborasi, adaptasi, dan pembaruan diri. Sedangkan tujuan operasi mencapai tingkat keuntungan, posisi pasar, sumber daya, efisiensi, kualitas, inovasi dan tanggung jawab sosial. Bagaimana tujuan-tujuan itu dicapai merupakan hal yang sangat penting. Manajer harus menetapkan sasaran atau sekurang-kurangnya aktif terlibat dalam proses penentuan sasaran.

b. Prinsip Manajemen Berdasarkan Orang

Manajemen berdasarkan orang merupakan suatu konsep manajemen modern yang mengkaji keterkaitan dimensi perilaku, komponen sistem dalam kaitannya dengan perubahan dan pengembangan yang muncul sebagai akibat tuntutan lingkungan internal dan eksternal, membawa implikasi terhadap perubahan perilaku dan kelompok dan wadahnya.

Manajer pada umumnya bekerja pada lingkungan yang selalu berubah. Perubahan lingkungan yang bermacam-macam, menuntut organisasi selalu menyesuaikan diri. Salah satu upaya yang paling penting adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia. Namun, pengembangan SDM harus diimbangi dengan pengembangan organisasi. Tuntutan perubahan organisasi juga sering ditemukan dalam berbagai konflik, baik konflik individu, kelompok, maupun antarkelompok. Konflik ini mengharuskan adanya restrukturisasi atau perubahan dan penataan pekerjaan, dan desain organisasi yang ada. Oleh karena itu, tuntutan akan perubahan merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Perubahan perilaku dan perubahan organisasi merupakan bagian esensial dari manajemen inovasi sebagai dampak globalisasi di berbagai bidang kehidupan.

c. Prinsip Manajemen Berdasarkan Informasi

Perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan merupakan kegiatan manajerial yang pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan. Semua kegiatan tersebut membutuhkan informasi.

Informasi yang dibutuhkan oleh manajer disediakan oleh suatu sistem informasi manajemen (*Management Information System/MIS*) yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajer secara teratur. Informasi ini dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Shrode D. Voich informasi merupakan sumber dasar bagi organisasi dan esensial agar operasionalisasi dan manajemen berfungsi secara efektif. Informasi yang dibutuhkan oleh manajer berkenaan dengan konsumen, pemasok, dan lingkungan untuk menentukan pilihan dan perencanaan, Gordon B. Davis mengartikan sistem informasi manajemen sebagai sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi informasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

Sistem itu sendiri ada karena berbagai tekanan untuk mengembangkan informasi seiring dengan perkembangan lingkungan. Dengan perkataan lain SIM (Sistem Informasi Manajemen) merupakan keseluruhan jaringan informasi yang ditujukan kepada pembuatan keterangan-keterangan bagi manajer yang berfungsi untuk pengambilan keputusan. Informasi itu sendiri merupakan data yang telah diolah, dianalisis melalui suatu cara sehingga menjadi berarti. Sedangkan data adalah fakta atau fenomena yang belum dianalisis, seperti, jumlah, angka, nama, lambang yang menggambarkan suatu objek, ide, kondisi, situasi.

Jika konsep teoritis di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Kota Pekalongan menetapkan sekolah model PAI, maka perlu dijelaskan mana saja sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah model PAI, siapa saja orang-orang yang posisinya strategis dalam

pelaksanaan kebijakan itu, dan perlunya informasi-informasi *feedback* dari sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah model PAI demi tercapainya tujuan kebijakan itu sendiri. Terkait dengan sasaran atau sekolah-sekolah mana saja yang ditetapkan sebagai sekolah model PAI, maka penting kiranya kriteria sekolah seperti apa yang layak ditetapkan sebagai sekolah model PAI. Tentang siapa saja orang-orang yang posisinya strategis dalam pelaksanaan kebijakan sekolah model PAI, maka sudah barang tentu Kasi Mapenda Islam Depag Kota Pekalongan, Kabid PAUD SD dan Dikmas Dindikpora Kota Pekalongan, Kepala Sekolah, Guru PAI, dan guru-guru lainnya merupakan mereka yang posisinya strategis dalam pelaksanaan sekolah model PAI. Dan tentang informasi *feedback* dari sekolah yang bersangkutan, hal itu akan menjadi komunikasi yang efektif agar kebijakan sekolah model PAI tidak justru membebani atau bahkan merusak tatanan edukatif yang sudah terbangun di sekolah.

B. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Menurut Ahmad D. Marribah sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata (2003: 10) bahwa pendidikan dapat diartikan secara sempit, dan dapat pula diartikan secara luas. Secara sempit dapat diartikan: “bimbingan yang diberikan kepada anak-anak sampai ia dewasa”.

Menurut M. Natsir Ali sebagaimana dikutip Abuddin Nata (2003: 11), pendidikan dalam arti luas adalah “segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak yang pada gilirannya ia menjadi orang pandai, baik, mampu hidup dan berguna bagi masyarakat”.

Menurut Driyarkara sebagaimana dikutip Nanang Fattah (2000: 4) mengatakan bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia muda. Peningkatan manusia muda ke taraf mendidik.

Dalam *Dictionary of Education* dinyatakan bahwa pendidikan adalah: 1) proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup, 2) proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Dengan kata lain pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen (tetap) dalam tingkah laku, pikiran, dan sikapnya.

Menurut Crow and Crow sebagaimana dikutip Nanang Fattah (2000: 5); *Modern educational theory and practise not only are aimed at preparation for future living but also are operative in determining the*

patern of present, day-by-day attitude and behavior. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangannya menuju ke tingkat kedewasaannya.

Menurut Syed Naquib al-Attas sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata (2003: 11) bahwa pendidikan berasal dari kata *ta'dib*. Memang terdapat kata lain yang berkaitan dengan pendidikan selain *ta'dib*, yakni *tarbiyah* lebih menekankan pada mengasuh, menanggung, memberi makan, memelihara, dan menjadikan bertambah dalam pertumbuhan.

Selanjutnya Naquib menyatakan bahwa: penekanan pada 'adab' yang mencakup dalam amal pendidikan dan proses pendidikan, adalah untuk menjamin bahwa ilmu dipergunakan secara baik dalam masyarakat. Karena alasan inilah maka orang-orang bijak terdahulu mengkombinasikan ilmu dengan amal dan adab, dan menganggap kombinasi harmonis ketiganya sebagai pendidikan.

Pendidikan memang bukan sekedar transfer pengetahuan, pembinaan mental, jasmani dan intelek semata, akan tetapi bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan dipraktekkan dalam perilaku sehari-sehari.

Menurut Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata (2003: 11-12) bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan tidak hanya bersifat pelaku

pembangunan tetapi sering merupakan perjuangan. Pendidikan berarti memelihara hidup ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berdasar peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.

Selanjutnya Abuddin menyampaikan bahwa rumusan pendidikan tersebut memberikan kesan dinamis, modern, dan progresif. Pendidikan tidak boleh hanya memberi bekal untuk membangun, tetapi seberapa jauh pendidikan yang diberikan itu berguna untuk menunjang kemajuan suatu bangsa. Semangat progresif yang terkandung dalam rumusan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan kita pada pesan Khalifah Umar Ibnu Khatab yang mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang adalah generasi di masa yang akan datang. Dunia dan kehidupan yang akan dihadapi berbeda dengan dunia sekarang. Untuk itu apa yang diberikan kepada anak didik harus memperkirakan kemungkinan relevansi dan kegunaannya di masa datang.

Sementara itu, Nanang Fattah (2000: 5) mengidentifikasi beberapa ciri pendidikan, antara lain yaitu:

- a. Pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup.
- b. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih isi (materi), strategi, dan teknik penilaiannya yang sesuai.

- c. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (formal dan non formal).

Apabila dikaitkan dengan keberadaan dan hakikat kehidupan manusia, kemanakah pendidikan itu diarahkan? Jawabannya untuk pembentukan kepribadian manusia, yaitu mengembangkan manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk beragama (religius).

2. Tujuan Pendidikan

Tujuan adalah batas akhir yang dicita-citakan seseorang dan dijadikan pusat perhatiannya untuk dicapai melalui usaha. Dalam tujuan terkandung cita-cita, kehendak, dan kesengajaan serta berkonsekuensi penyusunan daya-upaya untuk mencapainya (M. Suparta dan Herry Noer Aly, 2008: 79).

Pembahasan tentang tujuan secara mendasar merupakan bidang kajian filsafat, khususnya filsafat tentang manusia dan kedudukannya di tengah dunianya dengan segenap harapan dan kebutuhannya, baik yang menyangkut harapan duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, untuk membahas tujuan pendidikan, ilmu pendidikan selalu berkonsultasi kepada filsafat pendidikan, yang meninjau segenap konsepsi pendidikan dalam konteksnya yang lebih tinggi.

Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam proses pendidikan. Hal itu disebabkan oleh fungsi-fungsi yang dipikulnya.

Fungsi-fungsi tersebut menurut M. Suparta dan Herry Noer Aly (2008: 79-80) yaitu:

- a. Tujuan pendidikan mengarahkan perbuatan mendidik. Fungsi ini menunjukkan pentingnya perumusan dan pembatasan tujuan pendidikan secara jelas. Tanpa tujuan yang jelas, proses pendidikan akan berjalan tidak efektif dan tidak efisien, bahkan tidak menentu dan salah dalam menggunakan metode, sehingga tidak mencapai manfaat.
- b. Tujuan pendidikan mengakhiri usaha pendidikan. Apabila tujuannya telah tercapai, maka berakhir pula usaha tersebut. Usaha yang terhenti sebelum tujuannya tercapai, sesungguhnya belum dapat disebut berakhir, tetapi hanya mengalami kegagalan yang antara lain disebabkan oleh tidak jelasnya rumusan tujuan pendidikan.
- c. Tujuan pendidikan di satu sisi membatasi lingkup suatu usaha pendidikan, tetapi di sisi lain mempengaruhi dinamikanya. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan usaha berproses yang di dalamnya usaha-usaha pokok dan usaha-usaha parsial saling terkait. Tiap-tiap usaha memiliki tujuannya masing-masing. Usaha pokok memiliki tujuan yang lebih tinggi dan lebih umum, sedangkan usaha-usaha parsial memiliki tujuan yang lebih rendah dan lebih spesifik.
- d. Tujuan pendidikan memberi semangat dan dorongan untuk melaksanakan pendidikan. Hal ini berlaku juga pada setiap perbuatan. Sebagai contoh, seseorang diperintah untuk berjalan di jalan tertentu tanpa dijelaskan kepadanya mengapa ia harus menempuh jalan itu atau

tanpa diberi kesempatan untuk memilih jalan lain. Dengan perintah yang demikian, barangkali orang itu akan berjalan ragu-ragu. Akibatnya, ia akan berjalan lamban. Lain halnya, apabila dijelaskan kepadanya bahwa di jalan itu ia akan mendapatkan kebun yang indah serta pemiliknya seorang yang ramah dan suka mengajak orang-orang yang lewat untuk makan bersamanya, sementara kebetulan ia sedang lapar, tentu ia akan menempuh jalan itu dengan penuh semangat.

Pelaksanaan tujuan pendidikan tidak dapat dikerjakan sekaligus sehingga mencapai tingkat yang dicita-citakan. Ini harus melalui fase-fase yang membantu terlaksananya cita-cita tersebut yang merupakan tujuan khusus, melalui tingkat-tingkat perkembangan tertentu sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa siswa, juga ada tujuan-tujuan khusus bagi tingkat-tingkat pendidikan agar dengan sistem yang urut siswa akan mudah menguasai dan melakukan isi cita-cita pendidikan yang telah digariskan.

Pada umumnya tujuan pendidikan disusun dalam hirarki dari yang paling umum kepada yang paling operasional. Hirarki dimaksud ialah tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan standar kompetensi, dan tujuan kompetensi dasar.

Tujuan nasional bersifat umum, menggambarkan bentuk kepribadian peserta didik dalam wujud keseluruhan setelah menempuh pendidikan. Tujuan yang menggambarkan kepribadian nasional ini berlaku

bagi setiap sekolah dan merupakan sumber dari segala tujuan dari berbagai tingkatan sekolah. Tujuan Pendidikan Nasional yaitu:

”Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan” (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Pada tingkatan yang lebih rendah setiap tingkatan dan jenis sekolah ingin mengantarkan siswanya mencapai perubahan perilaku yang berhubungan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap tertentu. Tujuan ini pun dipandang sebagai tujuan umum tujuan umum sekolah. Untuk mencapai tujuan umum sekolah itu pun perlu penjabaran lebih terinci yang lebih dapat menggambarkan bentuk-bentuk pengetahuan apa, keterampilan apa dan sikap bagaimana diharapkan dapat dimiliki oleh lulusannya. Tujuan semacam ini menggambarkan kurikulum sekolah yang akan dilaksanakan. Sedangkan jabaran dari tujuan kurikulum sekolah akan menghasilkan bentuk-bentuk perubahan perilaku yang lebih khusus lagi yang dicapai dari proses belajar-mengajar, yakni tujuan pengajaran. Untuk lebih memberikan corak perubahan perilaku khusus sehingga bisa diamati, bahkan bisa dievaluasi dapat pula tujuan pengajaran dijabarkan lagi dalam bentuk tujuan pengajaran khusus.

Tujuan dapat dikelompokkan dalam tiga macam (M. Suparta dan Herry Noer Aly, 2008: 81), yaitu:

- a. Tujuan jangka panjang (*long term objectives-aims*).

- b. Tujuan antara-perantara (*intermediate objectives-goals*).
- c. Tujuan segera (*immediate objectives-specific objectives*).

Tujuan umum pendidikan nasional jelas hanya dapat dicapai setelah melalui proses pendidikan jangka panjang, sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Sebagai perantaranya adalah tujuan sekolah dan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan kurikulum sekolah itu dilaksanakan proses belajar-mengajar, yang juga mempunyai tujuan. Tujuan ini dapat segera dicapai setelah selesai proses belajar-mengajar.

Penggolongan tujuan tidak dimaksudkan untuk membuat pembedaan. Ini dilakukan untuk memudahkan kajian, sehingga dapat dihasilkan suatu pembahasan yang lebih terurai. Sebab pada hakikatnya suatu jenis tujuan yang lebih sempit atau lebih khusus merupakan penjabaran dan langkah untuk mencapai tujuan yang lebih umum di atasnya. Jadi, apa yang dicapai dari proses pendidikan adalah tujuan umum, melalui tujuan-tujuan khusus.

Sementara itu menurut Nanang Fattah (2000: 5), pendidikan berusaha mengembangkan potensi individu agar mampu berdiri sendiri. Untuk itu individu perlu diberi berbagai kemampuan dalam pengembangan berbagai hal, seperti; konsep, prinsip, kreativitas, tanggung jawab, dan keterampilan. Dengan kata lain perlu mengalami perkembangan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Demikian pula individu juga makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan

lingkungan sesamanya. Objek sosial ini akan berpengaruh terhadap perkembangan individu. Melalui pendidikan dapat dikembangkan suatu keadaan yang seimbang antara perkembangan aspek individual dan aspek sosial. Aspek lain yang dikembangkan adalah kehidupan susila. Hanya manusialah yang dapat menghayati norma-norma dan nilai-nilai dalam kehidupannya, sehingga manusia dapat menetapkan tingkah laku mana yang baik dan tingkah laku mana yang tidak baik dan tidak bersifat susila. Aspek lain adalah kehidupan religius dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dapat menghayati dan mengamalkan ajarannya sesuai dengan agamanya. Semua itu dapat terwujud melalui pendidikan.

3. Pendidikan Sebagai Suatu Sistem

Sesungguhnya, tata kehidupan manusia merupakan suatu sistem. Dikatakan sebagai suatu sistem karena di dalamnya ada sejumlah komponen yang memiliki fungsi dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan sistem.

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali. Untuk itu diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem.

Pengertian tentang sistem oleh Ryans sebagaimana dikutip Nanang Fattah (2000: 6) didefinisikan sebagai *“any identifiable assemblage of element (object, persons, information records, etc.) wick are interrelated*

by proces or structure and wich are presume to function as an organizational entity generating an observable (or sometimes merely inferable) product”.

Menurut Johnson sebagaimana dikutip oleh Syafaruddin dan Anzizhan (2008:15), sistem adalah suatu keterpaduan atau kebulatan yang kompleks atau kesatuan yang bulat. Dengan kata lain, suatu sistem merupakan suatu keterpaduan dari berbagai bagian membentuk satu kesatuan.

Sejalan dengan pendapat di atas, Salisbury (1996: 22) menjelaskan bahwa *“A system is a group of components working together as a functional unit”*. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian atau komponen yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan fungsi.

Sementara itu menurut Immagent dan Pilecki sebagaimana dikutip oleh Syafaruddin dan Anzizhan (2008: 16), sistem adalah sekumpulan objek dan menghubungkan objek itu dengan atributnya. Dengan kata lain, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari 1) sejumlah bagian-bagian, 2) atribut dari bagian dan hubungan antara bagian dengan atribut.

Berpijak pada definisi di atas dapat diidentifikasi bahwa sistem mengandung; elemen yang saling berkaitan, merupakan satu kesatuan. Kesatuan itu berfungsi mencapai tujuan, membuahkan hasil yang dapat diamati/dikenali. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam

usaha pendidikan. Sedangkan secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas.

Peserta didik dan pendidik merupakan elemen sentral. Pendidikan untuk kepentingan peserta didik mempunyai tujuan dan untuk mencapai tujuan ini ada berbagai sumber dan kendala. Dengan memperhatikan berbagai sumber dan kendala kemudian ditetapkan bahan pengajaran dan diusahakan berlangsungnya proses untuk mencapai tujuan. Proses ini membuahkan penampilan sebagai hasil belajar. Hasil belajar ini perlu dinilai dan hasil penilaian dapat merupakan umpan balik untuk mengkaji kembali berbagai elemen. Keseluruhan elemen ini tidak terlepas dari pengetahuan, teori, dan model-model pendidikan yang telah dimiliki, disusun dan dicobakan oleh para ahli.

Berbagai elemen dalam sistem pendidikan itu perlu dikenali secara mendalam sehingga dapat difungsikan dan dikembangkan. Di sinilah persoalan pentingnya penguasaan pendekatan sistem untuk mengkaji masalah-masalah, kelemahan, dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian akan tampak peninjauan secara mikro maupun secara makro berdasarkan pendekatan sistem dapat menghasilkan keputusan yang berupaya perbaikan sistem, sebagian atau seluruhnya, bertahap atau sekaligus. Keputusan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara optimal, produktif, efektif, dan efisien.

Pada akhirnya pendekatan sistem itu dipandang sebagai gaya manajerial (*managerial style*). Dalam hubungan ini aplikasi faham sistem

terhadap proses manajemen dan proses pendidikan itu nyata dalam wadah-wadah keorganisasian yang menjelaskan tentang adanya model umum dari suatu sistem. Model umum suatu organisasi sebagai suatu sistem adalah menuntut adanya komponen masukan (*input*), transformasi (proses) dan keluaran (*output*). Dapat disimpulkan bahwa pendekatan sistem dalam manajemen dan organisasi (pendidikan) adalah sebagai suatu metode yang berkaitan erat dengan usaha-usaha pemecahan masalah pendidikan yang kompleks. Hal itu dijalankan dengan memadukan berbagai unsur yang ada dengan menggunakan berbagai metode sehingga proses yang dilalui benar-benar dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Sementara itu, H.A.R. Tilaar (2002: 68) mengingatkan bahwa jangan sampai sistem pendidikan itu juga kaku. Sistem yang kaku serta mematikan partisipasi masyarakat, inisiatif, dan kreatifitas peserta didik dan pendidik tidak mungkin melahirkan iklim atau proses pendidikan yang demokratis. Begitu pula dengan suatu sistem yang kaku akan sulit dibangun suatu pendidikan yang akan menghasilkan *output* yang bermutu karena pendidikan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Dengan sendirinya kualitas manusia Indonesia yang hidup di dalam lingkungan daerahnya menjadi terasing dan tidak menunjang perbaikan taraf hidup di daerahnya sendiri. Pendidikan yang memenuhi kebutuhan daerah, adalah pendidikan yang meningkatkan mutu kualitas manusia Indonesia. Sebagai pengalaman pahit, pendidikan di masa Orde

Baru telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia robot yang kurang berkualitas dan tidak berdaya saing.

4. Pendidikan Agama Islam

Menurut Abuddin Nata (2003: 58) bahwa Istilah pendidikan Islam dapat dipahami dari tiga sudut pandang. *Pertama*, pendidikan Agama Islam. *Kedua*, Pendidikan dalam Islam. *Ketiga*, Pendidikan menurut Islam. Dari kerangka akademik ketiga sudut pandang tersebut harus dibedakan dengan tegas karena ketiganya akan melahirkan disiplin ilmu sendiri-sendiri.

Pendidikan Agama Islam menunjukkan kepada proses operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran agama Islam. Pendekatan ini kelak menjadi bahan kajian dalam “ilmu pendidikan Islam teoritis”. Selain itu, pendidikan Agama Islam juga merupakan istilah atau sebutan untuk mata pelajaran yang ada di SD hingga Perguruan Tinggi. Sedangkan Pendidikan dalam Islam bersifat sosio-historis dan menjadi bahan kajian dalam “sejarah pendidikan Islam”. Selanjutnya, Pendidikan menurut Islam bersifat normatif dan menjadi bahan kajian dalam “filsafat pendidikan Islam”.

Semenyara itu, menurut Haidar Putra Daulay (2004: 1) bahwa untuk meletakkan posisi Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, perlu diklasifikasikan menjadi tiga hal, yaitu: 1) Pendidikan

Islam sebagai Lembaga 2) Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran 3) Nilai-nilai Islami dalam UU No. 20 Tahun 2003.

Maka yang dimaksud di sini adalah Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran yang ada di setiap jenjang pendidikan formal, dari mulai SD hingga Perguruan Tinggi yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan PAI. Lebih jelasnya, Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran yang hanya disampaikan 2 jam seminggu di sekolah-sekolah umum.

Dalam Kurikulum 1994 sebagaimana dikutip Mastuhu (1999: 87) disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum adalah:

”Meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa tentang Agama Islam dan bertakwa kepada Allah swt, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.”

M.. Suparta dan Herry Noer Aly (2008: 84-85) menyampaikan bahwa tujuan kurikuler berkenaan dengan tujuan setiap bidang studi (untuk PAI, berkenaan dengan mata pelajaran) yang menggambarkan bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh peserta didik. Setiap bidang studi mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda dari bidang studi yang lain. Tujuan ini menjadi acuan dari bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari bidang studi tersebut. Oleh sebab itu, tujuan semacam ini dapat

memberikan tuntunan kepada pelaksana kurikulum sekolah tentang bahan apa yang dapat dikembangkan dan disajikan.

Lebih lanjut Suparta dan Aly menyampaikan bahwa PAI adalah mata pelajaran, bukan bidang studi. Mata pelajaran PAI terdapat di semua jenjang pendidikan jalur sekolah sejak dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Perbedaan institusi berimplikasi pada perbedaan perumusan tujuan mata pelajaran agama Islam.

Menurut Suparta dan Aly bahwa secara formal tujuan itu dirinci dan dikembangkan untuk yang paling rendah dicapai melalui pendidikan pendahuluan (pra-sekolah) yang dirumuskan pada tujuan pengajaran agama Islam untuk Taman Kanak-kanak. Selanjutnya meningkat pada tujuan yang dirumuskan untuk sekolah permulaan (SD, Ibtidaiyah), meningkat lagi pada tujuan pengajaran untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan menengah. Tujuan untuk sekolah ini dirumuskan untuk pengajaran di SLTP, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat dengan itu. Tujuan pengajaran lanjutan ini ditingkatkan lagi pada tujuan pengajaran pada Perguruan Tinggi dengan variasi kompetensi dasarnya. Dengan ini berarti bahwa bobot dan mutunya semakin meningkat dan mendalam.

Penjenjangan tujuan ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan formal yang berlaku di Indonesia. Setiap tahap dari jenjang tujuan itu harus berisi unsur yang meliputi kandungan tujuan secara penuh dengan bobot dan mutu yang semakin meningkat sesuai dengan tingkatan

pengajaran. Setiap orang yang telah menyelesaikan satu tahap tingkatan pengajaran, diharapkan dapat hidup di tengah masyarakat dengan baik sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah menurut ajaran Islam, sebagai warga negara Pancasila, dan punya pekerjaan yang pantas untuk tingkatannya dengan penghasilan yang cukup. Untuk ini ia harus berilmu, punya keterampilan, baik untuk mencari nafkah atau untuk mengabdikan kepada Allah sebagai hamba Allah yang taat, punya sikap mental setia kepada negara dan yakin kepada ajaran Islam yang dianutnya.

Selanjutnya, berbicara tentang PAI berarti terkait pula dengan guru PAI. Bagi guru PAI tugas dan kewajiban merupakan amanat yang diterima oleh guru atas dasar pilihannya untuk memangku jabatan guru. Amanat tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha melihat” (al-Qur’an Terjemah “Syaamil”, 2007: 87).

Tanggung jawab guru ialah keyakinannya bahwa segala tindakannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didasarkan atas pertimbangan profesional (*professional judgement*) secara tepat. Pekerjaan guru menuntut kesungguhan dalam berbagai hal. Karenanya, posisi dan persyaratan para “pekerja pendidikan” atau orang-orang yang disebut pendidik karena pekerjaannya ini patut mendapat pertimbangan dan perhatian yang sungguh-sungguh pula. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar usaha pendidikan tidak jatuh ke tangan orang-orang yang bukan ahlinya, yang dapat mengakibatkan banyak kerugian. Rasulullah saw mengingatkan:

قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُضِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

Artinya : “... orang itu bertanya lagi; Bagaimana menyia-nyiakan amanat itu? Rasul menjawab; Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat itu” (HR. Bukhari).

Tanggung jawab guru PAI terhadap amanatnya sebagaimana dikemukakan di atas, seharusnya diwujudkan dalam upaya mengembangkan profesionalismenya, yaitu mengembangkan mutu, kualitas, dan tindak-tanduknya.

Kemudian terkait dengan Metodologi PAI, bahwa Metodologi PAI adalah ilmu yang membahas cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan pengajaran Agama Islam guna mencapai tujuan yang

ditentukan. Dalam pengertian ini metodologi PAI merupakan suatu cabang ilmu tentang mengajar (M. Suparta dan Herry Noer Aly, 2008: 19-20).

Lebih lanjut Suparta dan Aly mengatakan bahwa ilmu tentang mengajar disebut didaktik. Dalam mengajar, guru tidak hanya dituntut untuk menanamkan pengetahuan dan kecakapan kepada peserta didik, tetapi juga mendorong terjadinya proses belajar. Oleh sebab itu, didaktik adalah ilmu yang membahas tentang kegiatan proses mengajar yang menimbulkan proses belajar.

Kemudian Suparta dan Aly menjelaskan bahwa didaktik dibedakan menjadi didaktik umum dan didaktik khusus. Didaktik umum membahas prinsip-prinsip umum dalam mengajar dan belajar. Maka persoalan-persoalan yang berkenaan dengan tujuan mengajar, bagaimana terjadinya proses belajar pada peserta didik, bagaimana agar peserta didik dapat dengan mudah menerima bahan pelajaran, dan lain-lain merupakan topik-topik bahasan di dalam didaktik umum. Sementara itu, didaktik khusus membahas cara-cara guru menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik. Pembahasan dimaksudkan untuk mencari cara penyajian yang cepat dan tepat. Didaktik khusus disebut juga dengan metodik.

Cara-cara yang digunakan guru dalam mengajar ada yang dapat diterapkan kepada semua bahan pelajaran dan semua sekolah; ada pula yang berlaku khusus untuk suatu bahan pelajaran, seperti agama dan bahasa. Ilmu yang membahas cara-cara pertama disebut metodik umum, sedangkan yang membahas cara-cara kedua disebut metodik khusus. Dari

pembagian terakhir inilah diperoleh Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam atau Metodologi Pengajaran Agama Islam. Persoalan-persoalan yang dibahas di dalamnya terutama meliputi rencana pelajaran (kurikulum), bentuk pengajaran, jalan pelajaran, alat pelajaran, dan evaluasi.

Berpijak dari teori-pemikiran di atas, idealnya pembelajaran PAI termasuk di dalamnya tentang moral-akhlaq dan religiusitas perlu dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan lain, khususnya yang bersifat praktik keagamaan seperti: menutup aurat, kemampuan membaca kitab suci, mendirikan shalat, mengucapkan salam, berdoa yang baik, dan lain-lain. Dan itu semua bukan hanya tanggungjawab guru agama saja. Tetapi karena sekolah merupakan sebuah sistem, maka manajemen sekolah yang dilakukan yaitu melibatkan semua komponen sekolah yang ada, terutama para guru. Apalagi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan persyaratan utama bagi setiap guru, yang secara praktis berimplikasi pada keharusan setiap guru untuk mengimplisitkan nilai-nilai moral-akhlak dan religiusitas dalam setiap mata pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik.